

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jepang merupakan salah satu negara maju yang berada di Asia Timur. Hal ini didukung oleh masyarakatnya yang giat bekerja demi kemajuan negaranya. Konfusianisme merupakan salah satu ajaran yang dianut masyarakat Jepang untuk selalu giat bekerja demi memajukan negaranya sejak Era Edo (1603--1868). Ajaran ini juga menempatkan peran wanita yang berada di bawah laki-laki. “Wanita hanya berada di rumah untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, yaitu membersihkan rumah, menyiapkan sarapan untuk suami dan anak, dan lain-lain.” (Iwao, 1993: 17).

Besarnya peran yang ditanggung wanita dalam pekerjaan di sektor publik tidak lepas dari faktor budaya yang ada dalam suatu masyarakat. Wanita merupakan makhluk sosial yang memiliki peran tertentu, seperti mengurus rumah tangga, mengurus suami, dan membesarkan anak-anak. “Keterlibatan wanita di kedua sektor, sektor domestik (rumah) dan sektor publik (pekerjaan) ini kemudian melahirkan apa yang disebut dengan peran ganda.” (Nitimiharjo, 1999: 90). Di Jepang peran ganda wanita dapat terlihat jelas di dalam keluarga, yaitu mengatur keuangan dan pendidikan anak.

Dari sudut sejarahnya, wanita Jepang merupakan sosok yang dikenal sebagai makhluk yang lemah lembut, setia, dan anggun. Sifat ini yang menandakan bahwa wanita tidak mempunyai keistimewaan karena hanya menggunakan perasaan, sabar, dan penurut. Karakter wanita Jepang ini bukan hanya datang sejak mereka lahir, melainkan adanya pengaruh budaya Jepang yang membuat wanita Jepang mempunyai karakter seperti itu. Sistem kekaisaran dan sistem keluarga patriarki feodal membentuk dasar fundamental untuk mencapai tujuan politik. Dengan demikian, wanita ditempatkan di luar tatanan masyarakat hierarkis, terlepas dari kelas sosial mereka berada (Fujimura, 2011: 317).

Sistem *ie* juga sangat berpengaruh atas lemahnya peran wanita dalam segala hal. Sistem ini mengenal konsep patrilineal, yang menempatkan posisi laki-laki pemimpin dalam suatu rumah tangga. Pengambilan keputusan dalam sebuah keluarga hanya dilakukan oleh laki-laki, sedangkan wanita hanya

berhak mengurus kebutuhan rumah tangga dengan kata lain wanita hanya sebagai pelayan bagi suami dan anak-anaknya (Nakane, 1968).

Sistem *ie* terlihat pada kasus Pangeran Naruhito yang menjadi Kaisar Jepang. Kekaisaran Jepang menuai polemik. Ini dikarenakan Kaisar Naruhito tidak mempunyai anak laki-laki sebagai pewaris takhta selanjutnya. Akhirnya, posisi putra mahkota dialihkan kepada keponakan Naruhito, yaitu Hisahito yang masih berusia 12 tahun. Hukum kekaisaran Jepang tidak terlepas dari sistem *ie* yang sudah ada sejak dahulu dan hukum ini jugalah yang membuat wanita tidak bisa memperoleh kedudukan sebagai kaisar. Oleh karena itu, Putri Aiko tidak berada dalam pewaris takhta kekaisaran tersebut. Padahal, dilihat dari pendidikan dan pemikirannya, Putri Aiko sangat berpotensi sebagai kaisar selanjutnya (*sumber: BBC NEWS INDONESIA*).

Pimpinan tertinggi dalam politik Jepang masih didominasi oleh laki-laki, walaupun politik Jepang sudah berbeda dengan era sebelumnya, wanita tidak boleh ikut berpartisipasi dalam politik, ekonomi, dan lainnya. Iwao Sumiko mengatakan politik di Jepang masih memiliki banyak kekurangan, di antaranya minimnya komunikasi verbal dalam forum, seperti penetapan kebijakan, termasuk pada saat pemilu. Oleh karena itu, wanita tidak melihat politik sebagai suatu alat yang penting untuk meningkatkan status dan harga diri mereka.

Pemikiran tentang wanita yang selalu harus berada di bawah kehendak laki-laki mulai luntur setelah Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia II. Kazuko Sugawara (politikus dan penulis buku) memperkirakan partisipasi wanita dapat menunjukkan sikap moderat dalam pandangan dan tindakan

wanita serta akan berfungsi untuk menekan atau mengimbangi gerakan-gerakan yang terlihat pascaperang dunia II (Fujimura, 2011: 360).

Partisipasi wanita dalam politik Jepang sejak Perang Dunia II terus meningkat terutama di dalam anggota Diet Nasional (Badan Legislatif Jepang), 1976 sebesar 1%, 1980 sebesar 1,2%, 1985 sebanyak 1,6 %, 1987 sebesar 2,2%, dan pada 1990 Jepang berada di posisi 108 di antara negara-negara demokratis di dunia dengan persentase wanita dalam politik sebesar 5,9% (Iwao, 1993:219).

Dari sikap-sikap yang diskriminasi terhadap wanita tersebut, muncullah berbagai tokoh wanita Jepang beserta para aktivis yang peduli akan permasalahan ini. Lebih lanjut, Fujimura (2011) mengatakan “wanita merasa perlu untuk membebaskan diri Jepang dari ketidakadilan status yang tidak memihak mereka. Hal ini terlihat pada pemilihan wanita di majelis lokal di kota besar dan kota kecil sebagian besar didorong oleh kaum ibu rumah tangga yang memiliki pengetahuan tentang masalah sosial dan yang memiliki waktu untuk berorganisasi” (hlm. 365).

Tokoh-tokoh wanita mulai masuk ke bidang politik dan menimbulkan pemahaman-pemahaman yang baru. Pemahaman tersebut memosisikan peran wanita dan laki-laki secara setara. Keterampilan dan prestasi yang ditunjukkan oleh wanita menimbulkan anggapan bahwa antara laki-laki dan wanita tidak memiliki banyak perbedaan. Beban dan tanggungjawab seorang wanita bisa dikatakan dua kali lipat dibandingkan dengan laki-laki karena wanita masih harus berperan sebagai seorang ibu dan istri.

Kemunculan tokoh-tokoh seperti Doi Takako, yaitu pemimpin dari Partai Sosial Demokrat, Yuriko Koike yang merupakan gubernur Tokyo pada saat ini, Yuko Obuchi sebagai Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, Seiko Noda yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Jepang dan masih banyak lagi wanita yang berkarier dalam politik Jepang yang membuat perubahan besar dalam politik Jepang. Hal-hal tersebut sangat tertarik untuk diteliti dan melihat lebih jauh bagaimana peran wanita dalam politik Jepang.

1.2 Perumusan Masalah

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, banyak wanita yang ingin berpartisipasi dalam politik khususnya di pemerintahan. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran yang dilakukan oleh wanita Jepang dalam politik Pascaperang Dunia II?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan proposal ini adalah mendeskripsikan peran yang dilakukan oleh politikus wanita dalam politik Jepang Pascaperang Dunia II.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat mengetahui lebih dalam tentang keadaan politik di Jepang, khususnya wanita yang berada di lingkup pemerintahan. Adapun manfaat teoritis adalah untuk menjadikan tulisan ini sebagai referensi bagi penulis-penulis yang akan membahas tentang politik di Jepang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memperoleh data-data dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Peneliti akan membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada peran wanita dalam politik Jepang. Objek yang akan diteliti yaitu politikus wanita yang berperan penting dalam pemerintahan di Jepang setelah berakhirnya Perang Dunia II (1946-2020).

Penelitian ini menggunakan beberapa teori peran yang dikemukakan oleh beberapa tokoh dan teori feminisme sebagai landasan dalam mengkaji data-data yang diperoleh dari berbagai sumber.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif. Menurut Sugiyono (2008) “metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial.” (hlm. 15). Di lain pihak, Mudjia Rahardjo mengatakan bahwa “tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada merincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Dengan harapan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori.”

Ada beberapa langkah yang digunakan dalam menulis penelitian ini.

1. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diambil dari buku-buku fisik, *ebook*, jurnal, dan artikel yang membahas tentang tokoh yang akan dibahas.

2. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka. Studi kepustakaan merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama yaitu membaca buku fisik maupun dari *ebook* berbahasa Inggris lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ketiga, memilih data yang dianalisis.

4. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Dari data yang sudah ada, lalu dilakukan pengkategorian jenis peran apa saja yang dilakukan dan feminisme apa saja yang termasuk ke dalam tokoh tersebut.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun menjadi empat bab agar memudahkan para pembaca untuk tidak kebingungan saat membaca.

BAB I pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II landasan teori, menguraikan tentang data-data yang berkaitan dengan penelitian serta teori-teori yang digunakan untuk meneropong masalah pada penelitian ini.

BAB III temuan data dan pembahasannya, menguraikan secara detail mengenai dampak dari wanita yang ikut serta dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam politik Jepang. Selain itu, akan dijelaskan pula mengenai peran yang dilakukan politikus wanita Jepang dalam berpolitik.

BAB IV simpulan dari penelitian yang dilakukan.